



WRI INDONESIA



LAPORAN TAHUNAN WRI INDONESIA 2021

WRI-INDONESIA.ORG





DAFTAR ISI

Daftar Singkatan	2
Ringkasan Eksekutif	4
Tantangan dan Rencana Ke Depan	6
Hutan dan Bentang Lahan	8
Energi	12
Laut	16
Kota	18
Iklim	20
Riset, Data, dan Inovasi	24
Kegiatan di Tingkat Regional	25
Riau	25
Sumatra Selatan	25
Aceh dan Sumatra Barat	29
Papua dan Papua Barat	31
Rekan dan Sahabat WRI Indonesia	33
Laporan Keuangan	35
Sumber Daya Manusia	37

DAFTAR SINGKATAN

ACOP	: <i>Annual Communication on Progress</i>	IIASA	: <i>International Institute for Applied Systems</i>
AFi	: <i>The Accountability Framework Initiative</i>	ILOK	: Izin Lokasi
AKSI	: Aliansi Konservasi Indonesia	IUMK	: Izin Usaha Mikro Kecil
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>	IUP	: Izin Usaha Perkebunan
ASN	: Aparatur Sipil Negara	JIGD	: Jaringan Informasi Geospasial Daerah
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	SBTi	: <i>Science Based Target Initiative</i>
BIG	: Badan Informasi Geospasial	KADIN	: Kamar Dagang dan Industri Indonesia
BMP	: Best Management Practices	KBCF	: Kawal Borneo Community Foundation
BPDAS	: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	KKI	: Komunitas Konservasi Indonesia
CAC	: <i>Clean Air Catalyst</i>	KKN	: Kuliah Kerja Nyata
CEIA	: <i>Clean Energy Investment Accelerator</i>	KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
C4F	: <i>City for Forest</i>	KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
CHSE	: <i>Clean, Health, Safety, Environment</i>	KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
COP	: <i>Conference of the Parties</i>	KPPA	: Kelompok Pengrajin Perempuan Adat
COVID	: <i>Coronavirus Disease</i>	KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
CSOs	: <i>Civil Society Organizations</i>	KUB	: Kelompok Usaha Bersama
CUT	: <i>Coalition for Urban Transitions</i>	LCDI	: <i>Low Carbon Development Initiative</i>
DAS	: Daerah Aliran Sungai	LEZ	: <i>Low Emission Zone</i>
EBBT	: Energi Bersih, Baru, dan Terbarukan	LPHA	: Lembaga Pengelolaan Hutan Adat
EMISI	: Inisiatif Pengurangan dan Penyerapan Emisi	LPHD	: Lembaga Pengelola Hutan Desa
ESC TF	: <i>Environment, Sustainability & Climate Change Task Force</i>	LTKL	: Jejaring Mitra Lingkar Temu Kabupaten Lestari
FOLU	: <i>Forestry and other land uses</i>	LTS	: <i>Long Term Strategy</i>
GAP	: <i>Good Agricultural Practices</i>	MEKAR	: Metode Evaluasi Kesempatan Restorasi
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>	MHA	: Masyarakat Hukum Adat
GEF	: <i>Global Environmental Facility</i>	NCA	: <i>Natural Capital Accounting for Coastal Ecosystem</i>
GRASP	: Gotong Royong Atasi Susut & Limbah Pangan	NDCs	: <i>Nationally Determined Contributions</i>
GRK	: Gas Rumah Kaca	NGO	: <i>Non-Government Organization</i>
HHI	: Konsorsium Hari Hutan Indonesia	NKT	: Nilai Konversi Tinggi
ICRAF	: <i>World Agroforestry Center</i>		

NIB	: Nomor Izin Berusaha	SI PAKATAN	: Sistem Informasi Pendataan Konflik Tenurial Kawasan Hutan
NPAP	: <i>National Plastic Actions Partnership</i>	SONGKET	: Sistem Operasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu
UNILAK	: Universitas Lancang Kuning	SOP	: <i>Standard Operational Procedures</i>
USAID	: <i>United States Agency for International Development</i>	Stranas PK	: Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah	SUPA	: <i>Sustainable Use of Peatland and Haze Mitigation in ASEAN</i>
PKTKH-HA	: Konflik Tenurial Kawasan Hutan dan Hutan Adat	TBS	: Tandan Buah Segar
PLN	: Perusahaan Listrik Negara	TFA	: <i>Tropical Forest Alliance</i>
PS	: Perhutanan Sosial	UCRA	: <i>Urban Community Resilience Assessment</i>
PPIIG	: Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial	UNCEN	: Universitas Cendrawasih
PRIMS	: Pranata Informasi Restorasi Ekosistem Gambut	UNEP	: <i>United Nations Environment Programme</i>
RDI	: Riset, Data, dan Inovasi	UNFCC	: <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
REC	: <i>Renewable Energy Certificate</i>	UNIPA	: Universitas Papua
RPHA	: Rencana Pengelolaan Hutan Adat	UNL	: <i>University of Nebraska Lincoln</i>
RPHD	: Rencana Pengelolaan Hutan Desa	UNSRI	: Universitas Sriwijaya
RSPO	: <i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i>	UPTD KPH	: Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>	WRI	: <i>World Resources Institute</i>
SI-GAMBUT	: Sistem Data dan Informasi Ekosistem Gambut	WWF	: <i>World Wildlife Fund</i>
SI HUTSOS	: Sistem Informasi Perhutanan Sosial		
SIKATAN	: Sistem Informasi Kampung Agroforestry Tandun		

RINGKASAN EKSEKUTIF

Mendorong pencapaian target pemerintah

WRI Indonesia mendukung transformasi sektor energi, untuk mencapai target bauran energi bersih sebesar 23% di tahun 2025, bekerja sama dengan PLN (Perusahaan Listrik Negara) untuk menerbitkan sertifikat energi terbarukan (*Renewable Energy Certificate/REC*) dan menggagas skema *green tariffs* dalam produk energi bersih mereka. Di bawah kerangka REC, WRI Indonesia mendukung peningkatan kapasitas staf PLN dengan memberikan pengetahuan dasar terkait proses pengadaan energi bersih serta materi terkait pemasaran produk REC.

Untuk pertama kalinya, pemerintah memasukkan intensitas dan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai salah satu indikator makro pembangunan, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. WRI Indonesia melanjutkan dukungan kepada BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) melalui *pilot project* di beberapa provinsi untuk mentransformasikan rencana pembangunan daerah dan rencana aksi daerah dalam hal penurunan emisi gas rumah kaca

menuju rencana pembangunan rendah karbon. Selain itu, dukungan di tingkat nasional diberikan untuk meningkatkan kapasitas staf BAPPENAS, melanjutkan kerja sama dan komunikasi dengan beberapa kementerian teknis, *engagement* ke anggota parlemen, serta komunikasi LCDI (*Low Carbon Development Initiative*) di level internasional pada saat konvensi perubahan iklim Conference of the Parties (COP) 26 di Glasgow.

WRI Indonesia yang ditunjuk sebagai sekretariat inisiatif *National Plastic Actions Partnership* (NPAP) mendukung komitmen pemerintah untuk mengurangi sampah plastik di laut sebanyak 70% hingga tahun 2025. WRI Indonesia mendukung pemerintah melalui aliansi strategis beranggotakan pihak pemerintah, swasta, *multi-development bank*, dan lembaga nonpemerintah, guna mempercepat inisiatif ini.

WRI Indonesia mendukung sektor tata guna lahan yang berkelanjutan antara lain melalui percepatan implementasi program Perhutanan Sosial, di mana akumulasi capaian di tahun 2021 telah mencapai 4,8 juta hektar dari total target pemerintah sebesar 12,7 juta hektar kawasan hutan yang hak kelolanya akan diberikan kepada komunitas adat dan masyarakat lokal.





WRI Indonesia memberikan dukungan kepada pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas pemantauan tutupan hutan menggunakan *platform Global Forest Watch*, pengembangan *platform* pengelolaan data perusahaan perkebunan dan pekebun swadaya dalam rangka pencapaian Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. WRI Indonesia juga melakukan pemberdayaan petani sawit lokal dalam memperoleh sertifikat produksi sawit berkelanjutan, peningkatan produktivitas perkebunan serta memperbaiki praktek penanaman sawit yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dukungan di Tingkat Global

Kondisi pandemi COVID-19 masih membatasi keterlibatan WRI Indonesia dalam forum-forum internasional, meskipun ketika dimungkinkan WRI Indonesia tetap mengupayakan kehadiran secara daring (dalam jaringan, atau *online*).

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim atau COP 26 di Glasgow, Skotlandia, WRI Indonesia bekerja sama dengan *New Climate Economy* dan tim WRI global, memfasilitasi pertemuan antara Deputy Menteri BAPPENAS dan jajarannya dengan Pemerintah Inggris untuk mendiskusikan inisiatif pembangunan rendah karbon di Indonesia, serta dukungan Pemerintah Inggris guna mempercepat dan memperkuat implementasi inisiatif ini melalui pendanaan multi-tahun yang rencananya akan dimulai di tahun 2022.

Terkait perhelatan G20 yang akan diselenggarakan di Bali pada tahun 2022, WRI Indonesia secara aktif mendukung Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) dalam mengkoordinasi beberapa kegiatan kunci di pertemuan puncak G20 dalam upaya pengurangan sampah plastik laut. Selain itu, kerjasama yang dibangun bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) serta *Environment, Sustainability & Climate Change Task Force (ESC TF) B20* guna mendukung komitmen sektor usaha dalam mendukung upaya pemerintah untuk mencapai target *net zero emissions* terutama dengan pendekatan sains sebelum tahun 2060 juga telah dijajaki dan akan ditampilkan dalam forum internasional B20 di Bali.

Dalam laporan tahunan ini, WRI Indonesia menyajikan beberapa kegiatan utama WRI Indonesia sepanjang tahun 2021, dan rencana yang akan WRI Indonesia jalankan di tahun mendatang demi mencapai pembangunan Indonesia yang rendah karbon. WRI Indonesia meyakini bahwa kami tidak dapat mencapai tujuan tersebut dengan bekerja sendiri. WRI Indonesia sangat berterima kasih kepada para mitra kerja, kolaborator dan donor WRI Indonesia. Tanpa mereka, tidak satupun kegiatan dan dampak yang tercatat di dalam laporan ini dapat terlaksana.

TANTANGAN DAN RENCANA KE DEPAN



Pada tahun 2021, WRI Indonesia masih melanjutkan kegiatannya secara terbatas untuk menyikapi pandemi COVID 19. Survei internal untuk mengetahui kondisi dan persepsi karyawan WRI Indonesia dilaksanakan beberapa kali agar kebijakan bekerja dari rumah, bekerja jarak jauh, bekerja secara terbatas atau pada dasarnya bekerja secara hibrid dapat dirumuskan dengan tepat. Diputuskan bahwa sepanjang tahun 2021 modalitas berkegiatan utama WRI Indonesia adalah bekerja dari rumah atau *working from home*.

Mitra kerja WRI Indonesia seperti misalnya lembaga pemerintah pusat, daerah, kelompok masyarakat, dunia usaha, hingga donor memahami kebutuhan bekerja secara jarak jauh sebagai tata kerja dan kehidupan baru. Berbagai kelonggaran terkait dengan target pekerjaan diberlakukan, namun diharapkan capaian-capaian kunci dapat dirancang ulang atau dilaksanakan dengan tata waktu yang berbeda.

Secara terbatas dan dengan menjalankan protokol kesehatan ketat, telah dilaksanakan berbagai kegiatan lapangan di Papua, Papua Barat, Riau, dan Sumatra Selatan. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa hal-hal yang harus dihasilkan dari proyek dapat tercapai dan tidak mengubah tata waktu proyek terlalu banyak.

Sementara itu situasi pandemi juga mempengaruhi alokasi belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya berbagai program dan kegiatan pemerintah untuk memastikan transisi pembangunan menuju pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon yang termuat dalam RPJMN 2020-2024 tidak lagi menjadi prioritas. Bahkan pengalokasian anggaran yang tidak memprioritaskan pembangunan hijau berlanjut hingga tahun 2022.

Namun demikian dari sisi wacana pembangunan berkelanjutan, pembangunan rendah karbon, dan aksi-aksi perubahan iklim, Indonesia masih tetap menunjukkan komitmen politik yang kuat. Melalui COP26 di Glasgow pada November 2021, Indonesia bersama dengan lebih dari 120 negara lainnya mendeklarasikan tekad untuk mengurangi dan bahkan menghentikan deforestasi sebagai jalan mengurangi emisi GRK agar peningkatan suhu bumi tidak melebihi 1,5 derajat celsius pada 2030. Pada forum yang sama Indonesia juga ikut menandatangani komitmen pengurangan emisi gas metana.

Dalam forum G20 yang dilaksanakan pada Oktober 2021 di Roma menjelang COP26, Indonesia juga menyuarakan pentingnya melaksanakan aksi-aksi perubahan iklim sebagai kerangka kerja bersama negara-negara G20. Bahkan salah satu dari tiga agenda besar kepresidenan Indonesia pada G20 adalah tentang transisi energi menuju energi terbarukan, yang merupakan komitmen politik yang kuat bagi Indonesia untuk mengurangi emisi GRK pada sektor energi dan transportasi.

Pada bulan Oktober 2021, BAPPENAS meluncurkan laporan berjudul '*A Green Economy for a Net Zero Future*' yang memuat skenario-skenario emisi nol bersih dan dampak pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pembangunan untuk mencapai emisi nol bersih. Laporan ini diharapkan memberikan inspirasi dan referensi bagi perencanaan dan penganggaran 2023, dan agar Indonesia dapat mengakselerasi pembangunan rendah karbon seperti yang telah dirumuskan pada RPJMN 2020-2024.



Wacana pembangunan berkelanjutan, pembangunan rendah karbon, dan aksi-aksi perubahan iklim juga diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Peraturan ini akan menjadi pendorong terbentuknya pendanaan iklim berbasis perdagangan atau investasi karbon yang akan menjadi sumber pendanaan tambahan bagi Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim.

Dengan berbagai persiapan tersebut, tahun 2022 diharapkan menjadi tahun di mana Indonesia mulai bangkit dari deraan pandemi COVID 19, memperkuat dirinya untuk mempercepat pemulihan ekonomi secara hijau dan membangun dalam kerangka pembangunan rendah karbon.

Pada tahun 2021 ini pula WRI Indonesia mengakhiri pelaksanaan rangkaian kegiatan pembangunan rendah karbon pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan berkelanjutan yang didanai dari hibah Pemerintah Kerajaan Norwegia dan USAID Indonesia. Laporan akhir pelaksanaan hibah tersebut telah disampaikan kepada Kedutaan Besar Norwegia dan USAID pada Juni 2021, dibahas secara tripartit pada Agustus 2021 dan diterima dengan baik. Hibah tersebut direncanakan akan dilanjutkan melalui hibah tahap kedua yang direncanakan akan dilaksanakan pada 2022-2024.

WRI Indonesia sebagai sebuah lembaga penelitian independen, membangun kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, lembaga-lembaga non pemerintah untuk menekan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat. Melalui kerjasama lintas sektoral, lintas wilayah yuridiksi serta pendekatan yang inklusif dan berkeadilan sosial, WRI Indonesia mendorong agar terjadi percepatan pencapaian target setengah netralitas karbon pada tahun 2030.

Sektor-sektor yang akan menjadi fokus utama WRI Indonesia dalam tahun-tahun mendatang meliputi sektor keamanan dan keberlanjutan pangan untuk 296 juta jiwa penduduk Indonesia, sekaligus mengamankan 90 juta ha tutupan hutan, dengan antara lain mengurangi laju deforestasi hingga kurang dari 100 ribu Ha per tahun. Sektor energi juga menjadi fokus yang akan dikerjakan WRI Indonesia, antara lain untuk memperbesar penggunaan energi baru dan terbarukan, serta mempromosikan penggunaan energi yang lebih efisien di sektor transportasi. Sektor perkotaan juga akan menjadi fokus kerja WRI Indonesia untuk mendorong kota-kota yang lebih sehat, menggunakan energi yang lebih efisien untuk bangunan-bangunan dan mempercepat perputaran ekonomi perkotaan yang berkeadilan. WRI Indonesia juga akan mendorong kebijakan-kebijakan transfer keuangan yang berbasis lingkungan, mendukung pembangunan berbasis rendah karbon agar dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029.



HUTAN DAN BENTANG LAHAN

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat ada sekitar 25.863 desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang terdiri dari 9,2 juta rumah tangga serta lebih dari 50 juta penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem hutan. Ekosistem hutan memainkan peranan penting dalam menstabilkan iklim; menghasilkan makanan, air, kayu, dan obat-obatan; serta menaungi sebagian besar keanekaragaman hayati di dunia. Terlepas dari berkurangnya tingkat deforestasi di beberapa belahan dunia, ekosistem hutan masih sangat terancam. Berdasarkan penelitian WRI, 30 persen tutupan hutan global telah gundul, sementara 20 persen lainnya terdegradasi. Sebagian besar sisanya telah terfragmentasi, meninggalkan hanya sekitar 15 persen saja yang masih utuh.

Indonesia adalah negara hutan tropis ketiga terbesar di dunia, setelah hutan Amazon di Amerika Selatan dan hutan tropis Kongo di Afrika. Luas hutan di Indonesia diperkirakan sejumlah 110 juta hektar dari total luas daratan Indonesia seluas 188 juta hektar. Dari data pemerintah diperkirakan 50% total hutan Indonesia sudah dalam kondisi terdegradasi. Namun, sejak tahun 2016 berturut-turut hingga tahun 2021 Indonesia memiliki capaian baik dalam menurunkan tingkat deforestasi dari 900 ribu hektar (2016) menjadi 200 ribu hektar (2021).

WRI Indonesia bekerja bersama para pihak untuk mendorong tata kelola hutan dan bentang lahan yang lebih baik dan berkelanjutan melalui:

- 1) dukungan terhadap kebijakan satu peta; 2) mendorong terwujudnya perhutanan sosial; 3) mendukung restorasi lahan gambut; 4) tata kelola komoditas yang berkelanjutan; serta 5) mendukung penyediaan platform monitoring hutan yang lebih baik.

WRI Indonesia secara konsisten telah mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta, baik di level nasional maupun provinsi sejak 2016 hingga 2021. Hal ini untuk mewujudkan pengambilan keputusan tata Kelola lahan yang inklusif dan dapat dipertanggungjawabkan. Di tingkat nasional WRI Indonesia mendukung antara lain BIG (Badan Informasi Geospasial), Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dan Kantor Staf Presiden. Dukungan diberikan melalui serangkaian penelitian, pengembangan strategi komunikasi, peningkatan kapasitas, pembentukan PPIIG (Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial), penyusunan draft kebijakan dan Standard Operational Procedure (SOP), pembentukan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD). Dukungan teknis juga diberikan untuk peningkatan manajemen platform geospasial dan pengayaan data serta perangkat monitoring dan evaluasi informasi geospasial melalui Sistem Informasi Monitoring Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional (SIMOJANG).

WRI Indonesia mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong tercapainya target 12,7 juta Ha Perhutanan Sosial. Data dari KLHK, per 13 Desember 2021, realisasi perhutanan sosial sudah mencapai 4,8 juta ha. Dalam turut serta mempercepat tercapainya target, dukungan WRI Indonesia antara lain diwujudkan melalui asistensi pengusulan skema-skema perhutanan sosial di Riau dan Sumatra Selatan, dukungan pengembangan sistem navigasi perhutanan sosial dan membantu para pemegang ijin perhutanan sosial untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

WRI Indonesia mendukung upaya restorasi hutan dan lahan gambut melalui dukungan peningkatan kapasitas kepada Badan Restorasi Gambut yang kemudian menjadi Badan Restorasi Gambut dan



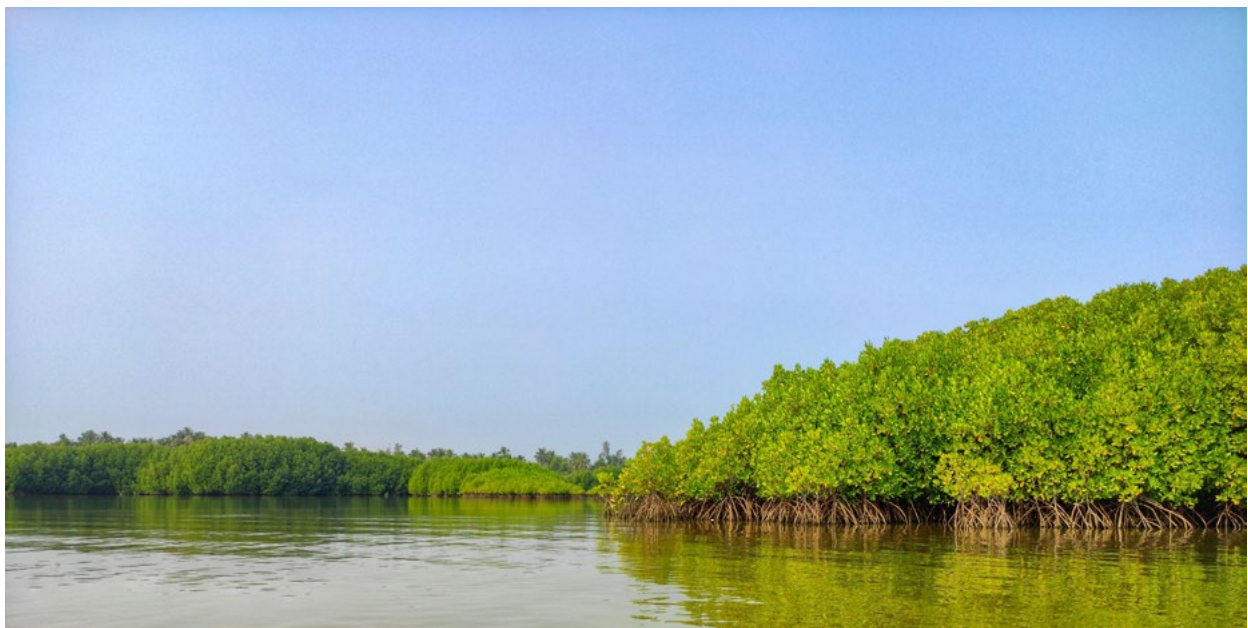
Mangrove, pengembangan platform monitoring restorasi gambut, serangkaian penelitian untuk adaptasi Metode Evaluasi Kesempatan Restorasi Gambut dan inisiatif koalisi Pantau Gambut.

WRI Indonesia mendukung upaya pemerintah mewujudkan tata Kelola minyak sawit berkelanjutan dalam rantai pasok kelapa sawit di Indonesia.

WRI Indonesia bekerja sama dengan perusahaan besar, seperti Unilever, memfasilitasi lebih dari 700 pekebun sawit swadaya untuk mendapatkan sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), yaitu skema sertifikasi minyak sawit berkelanjutan yang diakui oleh pasar dunia. Selain itu, WRI Indonesia bersama sembilan perusahaan produsen dan pembeli minyak sawit tergabung dalam koalisi yang mengembangkan sistem pemantauan hutan berbasis data radar dan mengujicobakannya di beberapa kabupaten di Indonesia yaitu di Siak dan Aceh Tamiang. Hal ini dilakukan melalui inisiatif pemantauan lansekap

menggunakan pendekatan kolaboratif dengan pemerintah daerah dan lembaga masyarakat sipil lainnya. Terakhir, adalah kegiatan dengan WRI China guna meningkatkan kesadaran konsumsi sawit berkelanjutan di negara Tirai Bambu tersebut, yang pada akhirnya dapat mendukung produksi sawit berkelanjutan di dalam negeri.

Untuk meningkatkan kapasitas pemantauan hutan nasional, WRI Indonesia mendukung pemerintah menyempurnakan Sistem Monitoring Hutan Nasional dengan menambahkan fitur dalam platform pemantauan daring milik pemerintah sehingga terdapat fungsi analisa di dalamnya. WRI Indonesia juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga masyarakat sipil di tingkat tapak untuk menggunakan platform Global Forest Watch, dalam meningkatkan efektifitas monitoring hutan di wilayah mereka dimana sumber daya yang tersedia sering kali sangat terbatas.



Capaian Utama

WRI Indonesia berupaya mewujudkan hutan yang sehat, produktif dan dikelola secara berkelanjutan, serta dapat berkontribusi pada upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memelihara keanekaragaman hayati. Dalam periode ini beberapa hal telah tercapai antara lain:

- Dukungan terhadap kebijakan satu peta: Keputusan Bupati No.18/2021 tentang Peraturan Satu Data Kabupaten Manokwari Selatan; Revisi Peraturan Gubernur Riau No.5/2019 untuk penyesuaian terhadap kebijakan Satu Data; Amandemen atas Peraturan Bupati Kampar No.47/2020 tentang kebijakan Satu Data Satu Peta; mendukung diterbitkannya Peraturan Gubernur No.4/2021 tentang Satu Data.
- Untuk mempercepat perhutanan sosial, WRI bekerja langsung di Tanah Papua, Riau dan Sumatra Selatan. Di Papua, WRI bersama dengan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua (PTPPMA) dan FOKER, melakukan pemetaan atas 303.904,5 ha wilayah adat yang mencakup area Bhuyaka (75.036,4 ha), Klisi (62.202,5 ha), Namblong (53.249,2 ha), Kemtuk Elsen

(113.416,3 ha). Di Sumatra Selatan bersama dengan unit pengelola hutan Dempo, HAKI dan pengelola perhutanan social melakukan pemetaan partisipatif di wilayah Mude Ayek Tebat Benawa (336 ha) di Kota Pagar Alam. Sedangkan di Riau, WRI lebih fokus pada pengembangan mata pencaharian masyarakat melalui usaha kerajinan anyaman pandana, budidaya lebah madu kelulut (trigona), pengembangan usaha adopsi pohon dan ekowisata.

- Tiga konflik tenurial terselesaikan (2 hutan adat di Riau dan 1 hutan adat di Sumatra Selatan) diakui Pemda & KLHK.
- Pada tahun 2021 dukungan utama terhadap BRGM melalui kegiatan PRIMIS (Pranata Informasi Restorasi Ekosistem Gambut) sudah berakhir dengan menyerahkan semua hasil-hasilnya. WRI tetap berkomitmen mendukung restorasi gambut dengan mengembangkan inisiatif untuk mendorong pengelolaan lahan gambut berkelanjutan di regional ASEAN dalam kerangka inisiatif Sustainable Use of Peatland and Haze Mitigation in ASEAN (SUPA). Metode Evaluasi Kesempatan Restorasi Gambut dikembangkan lebih lanjut untuk gambut tropis di Asia Tenggara. Pengelolaan pengetahuan gambut dikembangkan melalui modul-modul antara lain: Modul Pembahasan Lahan Gambut, Modul Revegetasi Lahan Gambut,



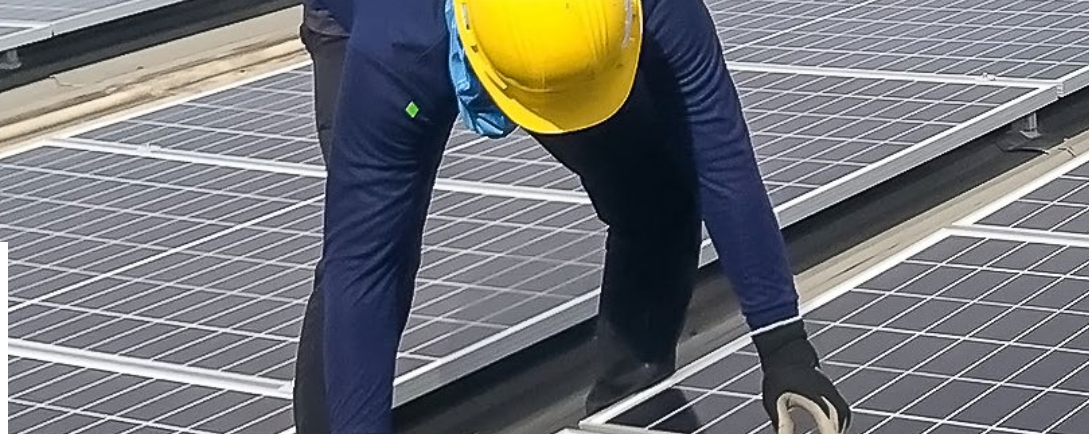
Modul Penentuan Satuan Lahan Restorasi gambut, Modul Pemanfaatan Lahan Gambut Berkelanjutan oleh Masyarakat dan modul Restorasi Lahan Gambut Sumatra Selatan. Laporan ilmiah juga dikembangkan antara lain mengenai Kelayakan Ekonomis Pengelolaan Gambut Berkelanjutan’.

- Dalam pengelolaan komoditas berkelanjutan WRI Indonesia telah menyelesaikan peta detail petani swadaya kakao di Kabupaten Jayapura (Kemtuk, Nimboran, Yapsi, South Gresi, Kaureh, Nimbokrang, Namblong, dan Kemtuk Gresi) dan petani swadaya kakao di Manokwari Selatan (Oransbari, Ransiki, Momiworen, Tahota, Isim, and Neney) dengan total 53 desa. Platform mobile E-STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) dikembangkan dan dilakukan test di Musi Banyuasin Sumatra Selatan. E-STDB versi 2.0 sudah di install di server Kementrian Agraria
- *Radar for Detecting Deforestation Alerts* (RADD), produk baru pemantauan hutan dengan resolusi spasial dan temporal yang lebih baik kini dapat diakses dan digunakan seluas-luasnya oleh publik dari Indonesia.
- Teknik klasifikasi pemetaan digital secara otomatis untuk komoditas strategis di Sumatra selatan sudah dikembangkan bersama dengan LAPAN dengan memanfaatkan *Google Earth Engine*.

- Strategi komunikasi dan narasi umum mengenai minyak kelapa sawit berkelanjutan telah dihasilkan untuk mengadvokasikan perdagangan minyak sawit dari sumber berkelanjutan antara Indonesia dan Cina, serta ekosistem untuk pasar karbon domestik dikembangkan dan disampaikan dalam dialog komoditas berkelanjutan regional yang dilaksanakan bersama dengan koalisi *Tropical Forest Alliance (TFA) & The Accountability Framework Initiative (AFI)*.
- WRI Indonesia mengembangkan beberapa studi dan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki mekanisme fiskal dan alokasi pembiayaan untuk mendorong kebijakan yang berkelanjutan di level nasional dan daerah. Naskah akademik untuk DAU (Dana Alokasi Umum) yang mempertimbangkan cakupan hutan di wilayah yurisdiksi telah diterbitkan tahun 2021 oleh Pemerintah Papua Barat. Kaukus Daerah Bertutupan Hutan telah terbentuk di bulan November terdiri dari para gubernur/wakil dari wilayah Aceh, Papua, Papua Barat dan Kalimantan Utara serta para bupati baik di dalam wilayah tersebut maupun di luar wilayah tersebut untuk meminta agar cakupan hutan menjadi pertimbangan relasi perimbangan keuangan antara nasional dan daerah.



ENERGI



Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 29% pada 2030 secara mandiri dan hingga 41% melalui kerjasama dan dukungan internasional sesuai dengan persetujuan Paris 2015. Tahun 2014, Pemerintah pun telah merevitalisasi kebijakan energi nasional yang meningkatkan target untuk tidak hanya mencapai 100% tingkat kelistrikan nasional di 2020, tetapi juga mencapai target 23% bauran energi terbarukan pada tahun 2025. Sayangnya, target energi terbarukan yang ambisius dan didukung dengan potensi tinggi sumber energi terbarukan seperti air, panas bumi, biogas dan biomassa, tenaga surya dan bahkan laut, belum didukung dengan pengembangan proyek kelistrikan yang 90 persennya masih didominasi oleh penggunaan batu bara sebagai sumber energi.

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030 menjadi RUPTL terhijau di mana PLN menargetkan penambahan pembangkit energi terbarukan sebanyak 52% dari total tambahan pembangkit hingga 2030. Angka tersebut menjadi sinyal positif dari pemerintah, apalagi dengan adanya peningkatan tren permintaan terhadap energi terbarukan dari konsumen sektor komersial dan industri sebagai konsumen energi terbesar di Indonesia, yakni 52% dari total konsumsi listrik di Indonesia. Perusahaan-perusahaan sektor komersial dan industri, seperti yang tergabung dalam inisiatif *Renewable Energy 100 (RE100)*, sudah banyak yang mencanangkan target iklim, termasuk melalui *Science-Based Target Initiative (SBTi)*, serta target pemakaian energi terbarukan di rantai pasok mereka.

WRI Indonesia, melalui inisiatif *Clean Energy Investment Accelerator (CEIA)*, berusaha memfasilitasi pencapaian target energi terbarukan oleh sektor komersial dan industri melalui pembangunan kapasitas, penyusunan rekomendasi kebijakan, dan asistensi teknis. CEIA juga berperan dalam menjembatani aspirasi perusahaan dengan pembuat kebijakan di pemerintah melalui dialog multi pihak dan asistensi kepada pemerintah untuk perumusan kebijakan.

Komitmen dan upaya pemerintah di tingkat nasional tentunya perlu untuk direalisasikan implementasinya di tingkat provinsi. Terlepas adanya Rencana Umum Energi Daerah (RUED), transisi energi di tingkat provinsi akan sangat bergantung pada kepemimpinan daerah dan partisipasi masyarakat setempat. Sebagai contoh, Provinsi Bali menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki peraturan gubernur tentang energi bersih dan kendaraan listrik. Peraturan-peraturan tersebut menjadi landasan berkembangnya ekosistem bisnis energi bersih dan kendaraan listrik yang banyak dimulai oleh perusahaan-perusahaan lokal di Bali. WRI Indonesia membantu pemerintah provinsi Bali dalam mendesain kebijakan-kebijakan turunan serta model bisnis inovatif, seperti melalui pembuatan peta jalan kendaraan listrik Bali. Pelibatan sektor swasta dan komunitas lokal, termasuk desa adat, untuk menggerakkan transisi energi menjadi salah satu fokus WRI untuk memastikan transisi yang berkeadilan.



Dalam periode pelaporan ini, sektor energi telah menyelesaikan capaian sebagai berikut:

- Kerjasama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terkait *Renewable Energy Certificate (REC)*. Untuk mempermudah sektor komersil dan industri dalam mendapatkan energi terbarukan di Indonesia, WRI Indonesia memperpanjang MoU dengan PLN untuk mengembangkan produk-produk hijau yang sesuai dengan standar internasional. Di tahun 2021, WRI Indonesia melalui CEIA membantu PLN dalam memperkuat kerangka implementasi produk REC melalui analisa dampak dan rekomendasi pengembangan lanjutan REC. Serangkaian kegiatan peningkatan kapasitas pengetahuan untuk PLN dan perusahaan-perusahaan pun dilakukan untuk memperdalam pemahaman terkait REC. REC menjadi salah satu opsi pengadaan energi terbarukan oleh perusahaan selain instalasi *on-site* yang memiliki keterbatasan kapasitas.
- Kegiatan percobaan konversi batu bara ke biomassa berkelanjutan sebagai sumber energi thermal sektor industri tekstil di Indonesia. WRI Indonesia melakukan asistensi teknis beserta *piloting* untuk implementasi campuran bahan bakar biomassa sebagai pengganti batu bara di dua pabrik rantai pasok sebuah perusahaan tekstil. Asistensi teknis dilakukan agar pabrik terkait dapat melakukan transisi energi dari menggunakan bahan bakar fosil menjadi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. WRI Indonesia bekerja sama dengan WWF Indonesia melakukan serangkaian analisis teknis untuk merekomendasikan bahan bakar biomassa yang paling kompatibel untuk jenis boiler yang digunakan. Pemilihan boiler mempertimbangkan parameter kemudahan pengadaan sumber daya bahan bakar yang berkelanjutan, investasi, dan durasi implementasi pergantian bahan bakar dan teknologi yang dibutuhkan. Di masa mendatang, hasil *piloting* ini akan menjadi pembelajaran bagi pabrik-pabrik lainnya yang menggunakan teknologi serupa untuk beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan.



- Memberikan rekomendasi kebijakan untuk Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Untuk mendukung ekosistem jual beli pasar *Renewable Energy Certificate (REC)* di Indonesia, WRI Indonesia bekerja sama dengan *Earth Justice* untuk menyusun sebuah rekomendasi kebijakan agar pasar sukarela REC di Indonesia dapat berkembang dan berjalan secara transparan dan adil. Ke depannya, kebijakan tersebut akan mengawal dan memastikan terwujudnya produk-produk REC yang berkualitas dan pasar REC yang sehat.
- Publikasi Mutual of Aspiration (MoA) untuk Energi Terbarukan. Pada tanggal 16 Agustus 2021, CEIA Indonesia bersama dengan 13 (tiga belas) perusahaan di Indonesia

mempublikasikan sebuah pernyataan aspirasi bersama untuk menyuarakan permintaan energi baru terbarukan dari sektor komersil dan industri. Pernyataan juga berisi dorongan untuk aktor-aktor pelaksana dan pemangku kebijakan di Indonesia dalam mempercepat transisi energi. Setelah bersama-sama memberikan sinyal permintaan energi baru yang kuat kepada pemerintah, lebih banyak perusahaan yang lebih vokal dalam mengutarakan target-target transisi energi mereka beserta dengan keinginan untuk mulai mengimplementasi energi terbarukan dalam kegiatan operasional mereka. Ke depannya, CEIA dan perusahaan-perusahaan tersebut akan terus mengawal terwujudnya pengadaan energi terbarukan yang lebih mudah untuk sektor komersi dan industri.



- Asistensi Teknis dan Training *Rooftop Solar PV* (RTS) untuk sektor komersil dan industri. WRI Indonesia telah melakukan asistensi teknis beserta dengan pendampingan evaluasi proyek RTS untuk beberapa pabrik rantai pasok dari perusahaan mitra kami. Pendampingan ini telah berhasil untuk mendorong dua perusahaan hingga berhasil mengeksekusi proyek sesuai dengan langkah yang direkomendasikan oleh CEIA. Selain itu, kami juga melakukan serangkaian pelatihan RTS yang dihadiri oleh lebih dari 20 perusahaan dari berbagai sektor industri. Cakupan dari pelatihan meliputi tahapan yang direkomendasikan untuk melakukan pengadaan RTS.

- Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kendaraan Listrik Provinsi Bali. Dinas Perhubungan Bali selaku Ketua Komite Percepatan Implementasi Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) bermitra dengan WRI Indonesia untuk menyusun Rencana Aksi Daerah KBLBB tahun 2022-2027. WRI Indonesia melakukan serangkaian studi dan diskusi multi pihak untuk memformulasikan target capaian KBLBB Bali per tahunnya dan sasaran kebijakan terkait, baik dari aspek manajemen, industri, infrastruktur, sumber daya manusia, dan pemasaran. Pendampingan WRI Indonesia untuk Provinsi Bali akan terus berlangsung hingga fase implementasi dan harapannya dapat direplikasi di berbagai provinsi lainnya di Indonesia.





LAUT

Sektor kelautan berkontribusi sebesar 2,5 triliun dolar AS terhadap perekonomian global setiap tahun, menjadi sumber pangan bagi 3 miliar penduduk, merupakan rumah bagi lebih dari separuh spesies dunia, menghasilkan separuh dari oksigen di planet, dan menyerap seperempat emisi karbon dioksida.

Indonesia terus berjuang melawan berbagai masalah lingkungan yang saat ini terjadi akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan. Permasalahan seperti polusi laut dan pesisir, perubahan iklim, dan perusakan habitat terus terjadi. Meningkatnya permintaan akan sumber daya, kemajuan teknologi, penangkapan ikan berlebihan, serta tata kelola dan penegakan hukum yang belum memadai juga berkontribusi terhadap kemerosotan kualitas laut.

WRI Indonesia menyelenggarakan inisiatif *New Ocean Economy* atau Ekonomi Laut Baru. Proyek ini antara lain bertujuan menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia saat ini dan di masa depan dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan laut yang berkelanjutan. Ekonomi Laut Baru akan menunjukkan manfaat pengelolaan laut secara berkelanjutan, biaya yang harus dikeluarkan jika Indonesia tidak mengelola laut dengan baik, dan peta jalan untuk mencapai bentuk perekonomian baru. Ekonomi Laut Baru akan mendukung Indonesia dalam mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan 14 dan dalam melaksanakan komitmen Indonesia terkait kelautan.

WRI Indonesia menyediakan penyusunan Database Pencemaran Laut Indonesia, sebuah platform yang menampilkan keadaan pencemaran laut di seluruh Indonesia, diukur melalui berbagai metodologi dan diverifikasi melalui proses peer-review. Tujuan platform ini adalah menempatkan data ke dalam peta interaktif daring untuk mendukung berbagai pemangku kepentingan dalam mengambil tindakan, seperti penjaga taman laut, petugas penegak hukum, nelayan, jurnalis lingkungan, organisasi kampanye, sektor swasta, dan pembuat kebijakan.

WRI Indonesia juga bekerja mengarusutamakan karbon biru dalam Ekonomi Laut Baru Indonesia. Termasuk di dalamnya menghitung nilai moneter ekosistem bakau, melakukan analisis biaya-manfaat pada restorasi bakau, mengumpulkan pengalaman dan pembelajaran dari konservasi dan restorasi bakau di seluruh Indonesia, dan mengidentifikasi mekanisme investasi inovatif untuk restorasi bakau. WRI Indonesia juga berupaya mendorong masuknya komponen karbon biru dalam kontribusi nasional Indonesia (NDC). Ekosistem bakau berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim, namun untuk saat ini masih dianggap sebagai “ekosistem yang terkena dampak” saja.

Bersama dengan lembaga nonpemerintah lainnya yang bekerja di bidang laut dan pesisir, WRI Indonesia akan mendukung advokasi pengelolaan bakau yang lebih baik di tingkat nasional dan subnasional.



WRI Indonesia berupaya mewujudkan laut yang sehat dan produktif dengan melestarikan ekosistem laut, meningkatkan produktivitas perikanan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir, melalui kegiatan-kegiatan berikut:

- Indonesia National Plastic Action Partnership (NPAP), kolaborasi multipihak yang bertujuan mengurangi 70 persen sampah plastik di lautan Indonesia pada 2025.
 - Laporan dan Platform Trenlaut untuk Tren Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Indonesia (*Trends in Marine Resources and Fisheries Management in Indonesia*), tren sumber daya kelautan dan manajemen perikanan di Indonesia yang menyajikan informasi mengenai peluang sekaligus ancaman bagi kesehatan laut dan perekonomian. Keduanya berdampak besar terhadap sektor perikanan dan kesejahteraan masyarakat.
 - Proyek *Natural Capital Accounting for Coastal Ecosystem* (NCA), merupakan kegiatan guna mendukung pengelolaan ekosistem pesisir berbasis data ilmiah, yang pada akhirnya akan mendorong agenda pembangunan berkelanjutan dan karbon biru di Indonesia.
 - Ecosystem Services Factors, proyek yang mendukung implementasi neraca sumber daya laut, yaitu kerangka kunci untuk memahami kontribusi laut pada manusia dan ekonomi—untuk mendorong pengambilan kebijakan berbasis data demi ekonomi laut berkelanjutan serta aksi iklim berbasis laut.
- Dalam periode pelaporan ini, sektor kelautan telah menyelesaikan capaian sebagai berikut:
- Menghasilkan produk pengetahuan tentang perikanan tangkap berkelanjutan, budi daya berkelanjutan, dan pengelolaan kawasan konservasi dan sumber daya laut, antara lain melalui Laporan Tren Kelautan yang sedang dikembangkan. Laporan ini juga untuk meningkatkan pengelolaan dan praktik perikanan berkelanjutan.
 - Mengurangi polusi dari plastik, limbah pertanian, dan sumber lainnya, melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh NPAP dan lima satuan tugas di dalamnya, yang terus-menerus melibatkan pemerintah, mitra pembangunan, donor, CSO, dan kelompok agama. Menilai kesenjangan keterkaitan antara dampak terestrial ke wilayah pesisir melalui analisis berbasis bukti.
 - Mengarusutamakan proses pembuatan kebijakan berbasis sains dalam tata kelola perikanan, yang tertuang dalam Laporan Tren Kelautan yang sedang dikembangkan. Pengembangan trenlaut.id, visualisasi data terbuka gratis tentang data terbaik yang tersedia di perikanan tangkap, budidaya berkelanjutan, serta kawasan dan pengelolaan konservasi.
 - Menghasilkan produk pengetahuan dalam domain penilaian/akuntansi pesisir, antara lain berupa makalah kerja terkait moratorium mangrove, ekowisata, dan indeks kerentanan pesisir telah dihasilkan. Dalam capaian ini juga termasuk penyelesaian masukan-masukan untuk laporan *Ocean for Prosperity* Bank Dunia.



KOTA

Sekitar 68 persen populasi Indonesia diprediksi akan menempati wilayah perkotaan pada tahun 2025. Tingkat permukaan laut pun diperkirakan akan meningkat, sehingga mengancam kota-kota terutama di daerah pesisir. Di tengah tantangan tersebut, Indonesia perlu memiliki paradigma pembangunan yang baru. Perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan seluruh aspek penting dalam kehidupan perkotaan, seperti transportasi umum, keselamatan berlalu lintas, efisiensi energi dan gedung, pengelolaan air, dan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim. Tidak hanya mempertimbangkan pembangunan di dalam kota, pemerintah juga harus melindungi hutan di dalam dan luar kota, serta di sepanjang daerah aliran sungai.

WRI Indonesia menyediakan dukungan teknis kepada pembuat kebijakan dan perencana pembangunan kota untuk meningkatkan ketahanan masyarakat perkotaan terhadap perubahan iklim dan mengurangi kecelakaan lalu lintas. Kegiatan WRI Indonesia meliputi:

- *Bandung Road Safety Initiative/ Keselamatan Jalan di Bandung*, Melalui kerja sama WRI Indonesia dengan inisiatif *Bloomberg's Global Road Safety*, WRI Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bandung untuk mengatasi masalah keamanan jalan dengan menggabungkan perencanaan kota dan perbaikan infrastruktur.
- *Cities4Forests*, inisiatif Kota Mendukung Hutan, berupa koalisi kota-kota di seluruh dunia untuk mengintegrasikan hutan kota, hutan sekitar kota, dan hutan yang jauh dari kota ke dalam program dan perencanaan pembangunan kota.

- *Clean Air Catalyst (CAC)* adalah sebuah program yang dipimpin oleh WRI dan Environmental Defense Fund dan didukung oleh USAID untuk membangun pemahaman bersama mengenai sumber polusi udara serta strategi untuk mengatasinya.
- *Low Emission Zone (LEZ)*, project yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta melalui serangkaian riset dan penyusunan strategi komunikasi. Tahun 2021 merupakan lanjutan dari inisiatif yang sudah dimulai sebelumnya.
- Inisiatif Pengurangan dan Penyerapan Emisi (EMISI), bekerja sama dengan pihak swasta mengembangkan aplikasi daring dan berbasis *smartphone* untuk menghitung jumlah emisi serta upaya pengurangan emisi dari sektor transportasi.

WRI Indonesia menjalankan strategi transformasi kota-kota, khususnya di wilayah pesisir menjadi lebih inklusif, rendah karbon, dan tangguh dengan memajukan solusi berbasis alam melalui perencanaan yang inklusif dan transformasional untuk meningkatkan kualitas udara, memperkuat ketahanan air, pengurangan limbah padat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Target pada level dampak yang diharapkan dari strategi ini adalah mencapai kota pesisir yang berkembang dan layak huni yang mampu mengatasi masalah iklim dan pandemi secara optimal dengan memanfaatkan solusi berbasis alam dan langkah-langkah pembangunan yang inklusif.



Dalam periode pelaporan ini, sektor perkotaan telah menyelesaikan capaian sebagai berikut:

1. Peningkatan pengelolaan hutan dalam kota (taman dan pohon) di Jakarta, melalui penerbitan dua Peraturan Gubernur, No. 49/2021 yang ditetapkan tgl 9 juli 2021 dan diundangkan tanggal 15 Juli 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan taman serta Peraturan Gubernur No.24/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pohon. Mengadopsi penilaian infrastruktur pengendalian banjir ke dalam rencana dan peraturan pemerintah Jakarta. Analisis banjir yang sedang dalam pengembangan akan menghasilkan rekomendasi mitigasi banjir NBS (*Nature Based Solutions*).
2. Peluncuran aplikasi EMISI v.2 yang bertujuan menarik *crowdfunding* untuk kegiatan restorasi hutan yang berkelanjutan, dimana puncak peluncurannya dilakukan atas kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BBC Media Action, Climate Policy Initiative, World Wildlife Fund, Rahsa Nusantara, SukkhaCitta, dan Waste4Change.
3. Melibatkan pengambil keputusan nasional untuk berkomitmen pada tindakan perkotaan berkelanjutan yang lebih ambisius, yang ditindaklanjuti dengan peluncuran laporan negara *Coalition for Urban Transitions* (CUT) yang melibatkan lembaga pemerintah nasional pada tanggal 7 Mei 2021.



IKLIM

Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung upaya global dalam mengatasi perubahan iklim dan mencegah temperatur naik tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Sejalan dengan komitmen ini, Pemerintah telah meluncurkan dokumen *Long Term Strategies for Low Carbon and Climate Resilience*, yang memuat komitmen Indonesia untuk menuju nol emisi bersih (target *net zero emission*) paling lambat pada tahun 2060.

Pengajuan Kontribusi Nasional yang Diniatkan (NDC) oleh Indonesia belakangan ini dan Persetujuan Paris adalah momentum yang positif bagi aksi iklim yang lebih kuat, khususnya untuk mendukung dunia menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celsius dan beradaptasi terhadap dampak terburuk perubahan iklim.

WRI Indonesia berupaya membantu pemerintah Indonesia dalam mencapai komitmen iklimnya untuk memastikan transisi yang berhasil menuju pembangunan rendah karbon. Beberapa inisiatif untuk mendorong pembangunan rendah karbon antara lain meliputi:

- *Low Carbon Development Initiative (LCDI)*, dimana untuk kali pertama Pemerintah Indonesia melalui BAPPENAS memasukkan indikator pengurangan emisi GRK ke dalam indikator makro pembangunan nasional dalam Dokumen RPJMN 2020-2024
- Sekretariat Koalisi FOLU (*Food and Land Use*) Indonesia dengan memosisikan diri sebagai *knowledge hub* yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan yang bekerja di sektor pangan untuk berkolaborasi mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan.





WRI Indonesia mendorong transformasi menuju sistem pangan berkelanjutan yang menjamin ketersediaan pangan sehat dan bergizi, keamanan pasokan dan akses di seluruh rantai nilai pangan, pengurangan susut dan limbah pangan, serta melindungi dan melestarikan alam untuk mencapai komitmen jangka panjang seperti yang tercantum dalam RPJMN Indonesia, SDGs (*Sustainable Development Goals*), dan NDCs (*Nationally Determined Contributions*). Secara khusus, WRI Indonesia melalui Koalisi FOLU Indonesia juga ikut mendukung Pemerintah RI sebagai bagian dari Delegasi Nasional untuk Pertemuan Sistem Pangan PBB (UN Food System Summit) 2021, khususnya pada Jalur Aksi nomor 3 terkait upaya Mendorong Produksi yang Ramah Lingkungan. UNFSS menjadi ajang bagi Pemerintah Indonesia dalam menyampaikan pokok pikiran dan strategi menuju transformasi sistem pangan yang berkelanjutan di Indonesia.

Koalisi FOLU Indonesia bersinergi dengan pemerintah khususnya BAPPENAS untuk menjalankan Agenda Aksi dan Strategi Peta Jalan untuk mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan. Dokumen ini memberikan wawasan tentang jalur dalam mengubah cara lahan digunakan, makanan diproduksi, hingga dipasarkan, dikonsumsi dan dibuang. Sebagai tindak lanjut, Koalisi FOLU Indonesia bersama BAPPENAS dan para mitra juga sedang merumuskan platform sistem pangan berkelanjutan yang nantinya akan menjadi wadah kolaborasi berbagai pemangku kepentingan seperti universitas, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), swasta, maupun dari berbagai kementerian untuk transformasi sistem pangan yang berkelanjutan.



Dalam periode pelaporan ini, portofolio iklim telah menyelesaikan capaian sebagai berikut:

1. WRI Indonesia dan New Climate Economy melanjutkan dukungannya kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk memasukkan skenario dan dampak COVID-19 ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) sebagai bagian dari LCDI. BAPPENAS meluncurkan Laporan Ekonomi Hijau pada Oktober 2021 yang mencakup skenario COVID-19 untuk mencapai target nol bersih pada tahun 2045, 2050, dan 2060
2. Mendukung BAPPENAS untuk mengubah narasi pembangunan ekonomi dan melaksanakan rencana pembangunan rendah karbon di beberapa provinsi percontohan, yaitu Papua Barat, Sulawesi Selatan, dan Riau. Pengembangan dokumen teknis di tingkat provinsi untuk menginformasikan perencanaan pembangunan provinsi sedang berlangsung
3. WRI Indonesia dan koalisi FOLU bekerja untuk menginformasikan para pembuat kebijakan tentang keberadaan Agenda Aksi FOLU Indonesia dan dapat menggunakannya sebagai referensi untuk meningkatkan sistem pangan dan tata guna lahan di negara ini.
4. WRI Indonesia dan New Climate Economy membentuk narasi ekonomi dan/atau melibatkan pengambil keputusan ekonomi tentang aksi iklim di Indonesia dan memulai analisis mendalam dan upaya keterlibatan pada ekonomi pangan dan tata guna lahan yang baru. Ringkasan kebijakan LCDI sektoral, termasuk susut pangan dan limbah serta dampak regulasi dari penetapan harga karbon telah dibuat.
5. Mempublikasikan lima makalah isu tentang aspek-aspek kunci dari strategi jangka panjang dan aspek peningkatan NDC: melakukan penjangkauan dan bantuan teknis tentang komitmen iklim Indonesia jangka panjang. Makalah ilmiah tentang peningkatan NDC sektoral untuk Papua Barat, kertas kerja LTS (*Long Term Strategy*)



untuk aksi iklim yang lebih ambisius. Makalah tersebut telah diterbitkan dalam berbagai publikasi dengan judul: *i) Towards a Low Carbon Solid Waste Management in West Papua; ii) Low Carbon Energy Model in West Papua; iii) Scenario for West Papua contribution for NDC from Forestry Sector; iv) Towards an eco-industrial development in West Papua Economy, dan v) Development of the Sustainable Human Development Index Model in West Papua.*

6. Peta jalan stimulus fiskal hijau Indonesia dan Membangun Kembali Lebih Baik melalui Pembangunan Rendah Karbon dikembangkan. Laporan Ekonomi Hijau BAPPENAS diluncurkan pada Oktober 2021 menampilkan skenario pemulihan pascapandemi COVID, sekaligus rekomendasi kebijakan dalam mencapai net zero emissions pada tahun 2045, 2050 dan 2060.
7. Platform pemodelan LCDI dikembangkan dan diterapkan bersama oleh BAPPENAS dan provinsi percontohan terpilih untuk melaksanakan perencanaan pembangunan

nasional dan provinsi. Bekerja sama dengan pemerintah provinsi, dan universitas lokal untuk mengembangkan model sektoral LCDI di tingkat provinsi.

8. Target Berbasis Sains dan Protokol GRK membantu menerjemahkan komitmen iklim nasional menjadi rencana yang lebih dapat ditindaklanjuti untuk sektor swasta. Webinar SBTi diadakan dengan mengundang sektor swasta di kawasan Asia Tenggara.
9. Pemodelan dan analisis mendalam untuk mendukung ambisi jangka panjang yang meningkat dari NDC Indonesia dan kebijakan perencanaan penggunaan lahan. Tiga makalah peningkatan NDC sektoral untuk West Papua telah diproduksi.
10. Keterlibatan dengan aktor non-negara di Asia Tenggara untuk meningkatkan kesadaran dan peran sektor swasta di kawasan dalam mencapai tujuan Science Based Target Initiative (SBTi). Bekerja dengan WRI India untuk pengembangan kapasitas sektor swasta SBTi di Filipina.



RISET, DATA, DAN INOVASI



Sesuai dengan semboyan WRI yaitu “*count it, change it, scale it*”, strategi yang ditempuh WRI Indonesia dalam setiap portofolio programnya selalu didasarkan pertimbangan ilmiah. Karya-karya ilmiah yang dihasilkan merupakan bagian dari komitmen WRI dalam melakukan perubahan dan memperluas perubahan tersebut berdasarkan temuan-temuan ilmiah yang ditemukan dalam studi-studi yang WRI Indonesia lakukan.

Divisi Riset, Data, dan Inovasi (RDI) adalah salah satu bagian terpenting dari WRI Indonesia yang memastikan semua produk pengetahuan yang dihasilkan telah melalui proses *peer review* yang ketat serta melibatkan pakar internal dan eksternal dalam rangka memastikan kualitas, akurasi, koherensi kelembagaan, dan mengurangi bias penelitian. Karya-karya tersebut memberikan argumentasi ilmiah yang sangat diperlukan dalam memajukan isu-isu keberlanjutan lingkungan pada tingkat pengambilan kebijakan baik di level nasional maupun subnasional.

Pada level nasional, aktivitas riset terkait permodelan *system dynamic* yang dilakukan pada program Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon contohnya diharapkan memberikan masukan berharga dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ramah lingkungan. Kemudian pada level subnasional/regional banyak pembelajaran dan juga masukan yang didapatkan dari implementasi program-program yang dilakukan oleh tim regional WRI Indonesia. Program dan kegiatan WRI Indonesia yang berada di wilayah Papua dan Sumatra menjadi laboratorium bagi topik-topik riset yang dilakukan. Contohnya peran WRI Indonesia selama ini dalam menjadi fasilitator pengakuan masyarakat hukum adat (MHA) baik di regional Sumatra maupun di Papua telah menghasilkan banyak pembelajaran terkait proses pengakuan

MHA dan juga peran MHA dalam optimalisasi adaptasi/mitigasi perubahan iklim. Dokumentasi terkait pembelajaran-pembejarian yang didapatkan pada level tapak akan berguna untuk masukan bagi formulasi kebijakan baik di level nasional maupun regional.

Sepanjang tahun 2021, tim peneliti WRI Indonesia telah menerbitkan lebih dari 20 publikasi yang terdiri dari 9 Knowledge Product WRI dan 12 artikel jurnal internasional. Karya ilmiah tersebut meneliti isu-isu penting dan relevan dengan program-program yang ada di WRI Indonesia. Beberapa judul publikasi oleh peneliti-peneliti WRI antara lain:

1. Partisipasi Perempuan dalam Hutan Adat
2. Hutan Desa dan Deforestasi di Indonesia
3. Dynamics of Local Governance; the Case of Peatland Restoration in Central Kalimantan, Indonesia
4. Assessment of Coastal Ecosystem Services and Its Condition for Policy Management Plan in East Nusa Tenggara, Indonesia
5. Meningkatkan Data dan Ambisi Iklim Indonesia Melalui Peningkatan Transparansi dan Skema Insentif

Publikasi-publikasi ini memberikan masukan penting terkait kinerja dan evaluasi program yang dilaksanakan oleh pemerintahan nasional maupun subnasional. Contohnya dalam penelitian “Partisipasi Perempuan dalam Hutan Adat”, peneliti WRI Indonesia memberikan temuan dan analisa yang dapat dijadikan masukan bagi pelaksanaan Program Perhutanan Sosial yang lebih inklusif dan *gender neutral*. Lalu pada publikasi “Meningkatkan Data dan Ambisi Iklim Indonesia melalui Peningkatan Transparansi dan Skema Insentif”, peneliti WRI Indonesia membahas hubungan antara pemerintah dan sektor swasta di Indonesia untuk meningkatkan ambisi iklim melalui berbagi data. Daftar lengkap dari publikasi yang diterbitkan oleh WRI Indonesia dapat dilihat pada <https://wri-indonesia.org/id/publications>.



KEGIATAN DI TINGKAT REGIONAL

Riau

Mendorong Implementasi Satu Peta di Level Tapak

WRI Indonesia melanjutkan dukungan untuk implementasi program Satu Peta Satu Data di Kabupaten Kampar, berkolaborasi dengan BIG dan juga Pusat Pengembangan Informasi Geospasial (PPIIG) UNRI (Universitas Riau). Tim JIGD Kampar juga menyusun *Standard Operational Procedures (SOP)* Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kampar. Pelatihan standarisasi data spasial untuk tim inti JIGD Kampar telah dilakukan dan tim JIGD Kampar juga telah mengunggah beberapa data spasial yang telah distandarisasi ke Geoportal Kampar.

WRI Indonesia memberikan dukungan kepada JIGD Provinsi Riau, bersama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfo) untuk melanjutkan proses pengesahan Peraturan Gubernur mengenai Satu Data Riau melalui Kementerian Dalam Negeri. WRI Indonesia mendukung proses penyusunan SOP yang disusun oleh Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI). SOP tersebut telah berhasil diselesaikan dan disosialisasikan secara langsung melalui kegiatan roadshow ke masing-masing instansi.

WRI Indonesia mendukung PPIIG UNRI untuk menyusun rencana strategis (Renstra), pada periode ini dokumen Renstra telah selesai disusun oleh tim PPIIG UNRI dengan pendampingan dari WRI. Rancangan ini kemudian disosialisasikan kepada seluruh OPD terkait dan juga BIG dan telah mendapat banyak masukan untuk penyempurnaan.

Dukungan untuk Stranas PK di Riau

WRI Indonesia bersama KPK terus mendampingi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau untuk melakukan standarisasi, sinkronisasi dan kompilasi data Izin Lokasi (ILOK) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebagai tahapan implementasi Strategi Nasional Penanggulangan Korupsi (Stranas-PK) di Riau. Koordinasi, monitoring dan evaluasi untuk kegiatan ini juga dilakukan secara rutin bersama dengan BIG dan Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Pada akhir bulan Maret 2021, seluruh data ILOK dan IUP kabupaten/kota di Provinsi Riau (Kecuali Kabupaten Kuantan Singingi) telah selesai dan dikirimkan ke BIG.

Telah dilakukan pertemuan tim Stranas PK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Gubernur Riau yang ditindaklanjuti oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan memanggil perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Riau untuk menyerahkan data-data yang diperlukan. Hasilnya, sebanyak 70 perusahaan perkebunan telah menyerahkan data-data terkait dengan izin usaha perkebunannya.

Pemetaan Partisipatif melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik.

Pada akhir bulan Februari seluruh rangkaian kegiatan pemetaan partisipatif di Kecamatan Tambang dan Kampa Kabupaten Kampar telah berhasil diselesaikan melalui kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Tematik, begitu juga dengan proses pengolahan data dan pembuatan modul pemetaan partisipatif sebagai dokumentasi pengetahuan dan pengalaman selama proses pemetaan partisipatif di Kabupaten Kampar dijalankan. Semua output tersebut disebarluaskan (file digital) kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan berbagai pihak terkait di provinsi Riau sebagai media pembelajaran.

Transformasi Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam

WRI Indonesia bersama CSO lokal di Riau membangun koalisi dalam rangka mendorong pelebagaan penanganan dan mitigasi konflik sumberdaya alam di Provinsi Riau. Adapun CSO yang sepakat untuk bersama-sama membangun koalisi adalah Bahtera Alam, Yayasan Pelopor Sehati, Kantor Bantuan Hukum Riau, dan Yayasan Gambut Riau. Koalisi telah menyusun policy brief yang kemudian diadvokasi kepada lembaga eksekutif dan legislative di provinsi Riau untuk mendorong pelebagaan penanganan konflik sumber daya alam.

Berbagai konflik lahan antar desa Tandun dengan desa sekitar telah diselesaikan oleh LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa) Tandun melalui dukungan dari berbagai pihak diantaranya Bagian Administrasi Wilayah Kabupaten Rokan Hulu, KPH Suligi Batu Gajah, Pemerintah Desa Tandun. Begitu juga dengan kelengkapan berbagai dokumen administrasi yang dimintakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai persyaratan untuk memperoleh izin.

Tim WRI Regional Riau bersama LPHD Tandun juga mengembangkan sebuah platform sederhana (Sistem Informasi Kampung Agroforestry Tandun/ SIKATAN) untuk inventarisasi, monitoring dan menyebarkan inisiatif agroforestry di Tandun berupa data rinci bibit yang sudah ditanam, lokasi, kondisi, foto dsb. SIKATAN direncanakan juga akan terintegrasi dengan inisiatif adopsi pohon yang juga sedang dikembangkan sebagai salah satu alternatif sumber penghidupan masyarakat di sekitar hutan.

Melalui serangkaian diskusi bersama beberapa CSO seperti Sawit Watch, Bahtera Alam dan perwakilan Sajogyo Foundation sepakat bersama-sama memberikan dukungan untuk upaya resolusi konflik penguasaan lahan seluas 140 hektar antara MHA Petapahan dengan sebuah perusahaan. Beberapa tahapan telah dilakukan, diantaranya: assessment awal dengan tujuan untuk melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan sebagai basis data untuk melakukan klaim dalam upaya mengembalikan hak ulayat MHA Kenegerian

Petapahan yang telah dikelola oleh perusahaan; Dialog dengan berbagai pihak dalam upaya penyelesaian konflik MHA Kenegerian Petapahan; Mendampingi MHA Petapahan dalam proses pengajuan *complaint* baik kepada perusahaan maupun RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*).

Dukungan untuk Pengembangan Inisiatif Mata Pencarian

- 1) Usaha Kerajinan Anyaman Pandan
WRI Indonesia melanjutkan dukungan untuk usaha kerajinan anyaman pandan yang dikelola oleh Kelompok Perempuan Adat dan Anak muda perempuan di empat desa di Kampar Kiri Hulu. Dari aspek pemasaran, dilakukan antara lain melalui pemasaran langsung (*offline*) dengan target pasar lokal. Berbagai produk telah berhasil dijual ke konsumen lokal di tingkat desa maupun kecamatan. Telah didirikan sebuah gerai di Desa Gema yang diberi nama Kodai Umbai, berfungsi sebagai tempat untuk menjual produk sekaligus sebagai *warehouse* (gudang) untuk membantu mempermudah distribusi produk dari 4 desa yang aksesnya cukup sulit. Membangun kerja sama pemasaran dengan komunitas wisata *Gema Village Adventure*, komunitas wisata outdoor @senjasubayang dan *Shelter Riau Adventure*. Membuat platform pemasaran *online* melalui media sosial. Memfasilitasi Kodai Umbai untuk mengikuti berbagai pameran produk bekerja sama dengan OPD terkait.

Dari aspek penguatan kelompok, tata kelola dan pengembangan usaha, pada periode ini tim menyusun dan mensosialisasikan SOP Pengolahan Bahan Baku, SOP Penerimaan Produk di Gerai dan SOP Pemasaran *Online* kepada semua anggota Kelompok Pengrajin Perempuan Adat (KPPA). Selain itu, skema pembagian hasil juga menjadi pembahasan utama. Dalam hal pengembangan usaha, tim juga menginisiasi kerjasama dan dukungan dari pemerintah, swasta dan berbagai pihak lainnya. Berbagai pelatihan pun diberikan untuk peningkatan kapasitas Kodai Umbai dan Kelompok perempuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan ramah lingkungan.



Peraga yang merupakan pohon itu Cahang-ahangnya yang muda serta telah dan-dian tangkai berwarna hijau gelap. Dalam dua tahun terakhir ini, ia melihat kelainan warna di antara dedaunan itu—putih-putih hingga yang kelik akan menjadi buah. Kalau ada orang yang kelihatan datang ke tempat itu dari dalam kamarnya mengorok. Kadang-kadang ia pernah akan hal itu, tapi sudah itu belum ada tanda-tanda orang lain datang ke sini. Tidak ada bekas-bekas kelang itu, bungkuk rokok, atau bungkuk perunggu kawat. Untuk saat ini, ia sudah puas duduk di sini, menatap pohon yang mempunyai amarahnya serta buah-buah merah-orang yang kelik akan menjadi buah mana pambawa kemana.

"Sebaiknya, saat duduk di depan pohon ini, ia merenungi, 'Akulah Rute yang sebenarnya, dan Akulah Rute yang sesungguhnya... ambillah kau peraga ini... dan aku bebas.'"

Peraga ini ia tidak bebas, kecuali bagi orang-orang yang datang dalam hal-hal, atau-orangnya yang ia dan itu sudah cukup. Semua orang telah pergi ke sana pada pertemuan dalam lekukan itu, mereka semua telah berkecambah, dari pada pagi-pagi mereka datang ke situ dilahirkan di dekat dalam itu, dan mereka pergi yang tak berubah, tidak pun dari masa itu. Peraga itu seperti pemandangan dalam, dan itu adalah di sana untuk atau tidak peduli. Peraga itu dipelihara ran terakhir yang akan bebas. Peraga itu adalah dari bayang. Kau itu-

... dan ke akarnya yang sudah memantapkan... dan tangkainya sudah...
 "Kambuh," bisik Koro untuk mereka kali lalu pergi. Dan dalam petak-petak kembali ke rumahnya, ia mengupak sepih terakhir kehidupan lamanya ke luar jendela mahi ke Coori Bar—se yang dilahirkan dari Eggs.

12

Seluruh amarahnya telah hilang.
 Percaya, Panto, sudah mengorok, semua sudah cukup dewasa untuk panti rumah-rumah sendiri dari anak-anak mereka dengan terang rakitan, itu keliru malin, apapun yang baik dibagikan, siap sin yang baik ditemui dan sudah begitu lama. Perlahan-lahan masa remaja Dan belum lagi dimulai sepenuhnya, tapi Rute tahu saat itu akan tiba. Namun ia menanti, dengan terang, sebab semua tidak lagi mengorok dirinya.

Kambuh Bill hampir kelabu sekerahnya dan sudah menipis.
 Kambuh Rute masih oklah, dengan pomang, sederhana, seperti di bulan Kadang-kadang ia mengoroknya, namun tak pernah mendalarnya.
 Berjalan-tubuh telah berubah sejak mereka berpisah di Shorland, Star Highway 27. Bill sepermanis sudah



Dari aspek sertifikasi produk, WRI Indonesia juga memberikan dukungan untuk kelompok Kodai Umbai dalam memperoleh Sertifikat *Clean, Health, Safety, Environment* (CHSE) dari Kemenparekraf RI. Sertifikat telah diberikan kepada Kodai Umbai kategori penyedia cendramata dan oleh-oleh.

Dari aspek perijinan, WRI memfasilitasi kelompok perempuan pengrajin anyaman (KPPA) untuk memperoleh izin menjadi Kelompok Usaha Bersama (KUB). Selain itu, setelah empat KPPA yang didampingi memperoleh Nomor Izin Berusaha (NIB), gerai pemasaran “Kodai Umbai” juga didaftarkan untuk memperoleh NIB sebagai usaha produksi dan pemasaran online dan offline. Saat ini, “Kodai Umbai” telah terdaftar dalam platform tersebut serta telah memperoleh NIB dan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil).

Dari aspek keberlanjutan, telah dilakukan survey ketersediaan bahan baku pandan di hutan adat yang ada di keempat kenegerian. Hasil survey sebagai dasar analisis untuk menjamin pengembangan usaha kerajinan anyaman pandan agar tidak bersifat eksploitatif (sesuai dengan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan).

- 2) Usaha Budaya Lebah Madu Kelulut (*Trigona*) Dukungan pada aspek peningkatan kapasitas, diantaranya berupa pelatihan pemanenan madu Kelulut di Kampa dan Petapahan, dukungan peralatan dan tambahan stup lebah Kelulut. Hingga akhir periode, kelompok budi daya lebah madu di Kampa telah mengelola 160 stup lebah, yang berasal dari dukungan WRI, penambahan log secara swadaya oleh kelompok, bantuan dari pemerintah dan hasil pengembangbiakan (pecah koloni). Harapannya ke depan log Kelulut yang dikelola dapat terus bertambah sesuai dengan potensi ketersediaan pakan di hutan adat (dengan menggunakan prinsip noneksploitatif).

Dukungan pada aspek kerjasama dengan inisiasi kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Universitas Lancang Kuning (UNILAK). MoU antara UNILAK dan Ninik Mamak Kenegerian Kampa ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2021. UNILAK juga secara resmi memberikan beasiswa penuh kepada pemuda adat Kenegerian Kampa di Fakultas Kehutanan UNILAK, yang diharapkan dapat menjadi *champion* yang akan memajukan masyarakat adat sekaligus melindungi hutan adat Kampa.

- 3) Pengembangan Usaha Adopsi Pohon WRI membantu mengembangkan *platform online* (website) adopsi pohon yang akan digunakan untuk sebagai database penyimpanan data pohon, berinteraksi dengan calon adopter serta sebagai platform yang akan menjamin transparansi dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana adopsi pohon. Pada tanggal 11 Agustus 2021 inisiatif Adopsi Pohon Riau diresmikan oleh Gubernur Riau didampingi oleh Kepala Dinas LHK Provinsi Riau. Jumlah komitmen Adopsi Pohon pada saat peresmian dari perorangan, lembaga maupun perusahaan mencapai 11.869 pohon atau setara dengan Rp 1,76 milyar. Sementara total jumlah pohon yang sudah diinventarisasi dan ada di sistem hanya 2.800 pohon. Oleh karena itu, Dinas LHK provinsi Riau melalui seluruh KPH yang ada di provinsi Riau berupaya keras untuk melakukan inventarisasi pohon tambahan untuk dapat menindaklanjuti komitmen dari parapihak tersebut.
- 4) Ekowisata Ekowisata merupakan salah satu alternatif sumber penghidupan (*livelihood*) yang diusulkan oleh masyarakat adat di Petapahan dan dituangkan dalam RPHA yang telah disusun. Untuk itu, WRI Indonesia memberikan dukungan untuk penyusunan desain blok (*block plan*) pengembangan ekowisata Imbo Putui. Penyusunan *block plan* tersebut dibantu oleh komunitas arsitek Riau dan Savana Studio. Secara teknis, penyusunan desain *block plan* ini dilakukan melalui diskusi dan konsultasi yang intensif dengan LPHA dan masyarakat adat.

Ekowisata Imbo Putui telah resmi diresmikan pada tanggal 29 November. Untuk mendukung inisiatif LPHA Petapahan, BPDAS Indragiri Rokan memberikan dukungan 5.500 batang bibit untuk restorasi Sungai Petapahan, selain itu kelompok ekowisata Imbo Putui juga telah membibitkan 1.000 batang tambahan. WRI Indonesia juga memberikan dukungan berupa peralatan untuk pengembangan ekowisata di Imbo Putui berupa *photovoltaic*, tenda camping, toilet portable, plang petunjuk dan informasi dan berbagai peralatan pendukung lainnya.

Mendorong Transformasi Pengelolaan Perkebunan Swadaya yang Berkelanjutan

Setelah dinyatakan lolos dalam audit untuk sertifikasi RSPO, keempat kelompok dampingan WRI Indonesia yaitu: Koperasi Beringin Jaya dan Koperasi Sawit Jaya di Kabupaten Siak dan FPSS Semarak Mudo dan PPKSS Tayo Barokah di Rokan Hulu masih harus menunggu beberapa bulan untuk memperoleh sertifikat RSPO dari lembaga auditor. WRI terus mendampingi kelompok untuk: Monitoring dan evaluasi penerapan prinsip dan kriteria RSPO pasca sertifikasi diantaranya pengelolaan NKT (Nilai Konversi Tinggi), pemeliharaan sekat kanal, monitoring tinggi muka air, implementasi *Good Agricultural Practices* (GAP), pencatatan tandan buah segar (TBS) dsb; mempersiapkan 3 kelompok untuk pendaftaran ke platform <https://PalmTrace.rspo.org> untuk transaksi kredit RSPO; dan mendampingi kelompok untuk menyusun laporan tahunan (*Annual Communication on Progress* (ACOP) RSPO).

Pada tanggal 14 Desember 2021, Gubernur Riau melakukan Penyerahan sertifikat RSPO kepada 4 kelompok dampingan WRI sebagai bentuk dukungan terhadap kelompok petani sawit swadaya berkelanjutan. Sementara itu, keempat kelompok juga telah mendapatkan dana kredit RSPO dari perusahaan.

WRI Indonesia bekerja sama dengan University of Nebraska Lincoln (UNL), masih menjalankan riset penerapan *best management practices* (BMP) pada petani percontohan di Desa Tandun. Pemantauan dilakukan melalui pengambilan data secara rutin setiap bulan terhadap petani percontohan dan kelompok petani bukan percontohan. Hasil analisis dari tim UNL menunjukkan adanya peningkatan produktifitas yang cukup signifikan dengan penerapan BMP pada kelompok percontohan tersebut.

Sumatra Selatan

Mendorong Implementasi Satu Peta di Level Tapak

WRI Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah provinsi Sumatra Selatan telah membangun dan meresmikan aplikasi SONGKET Sumsel (Sistem Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu Sumatra Selatan). WRI menyerahkan pengelolaannya platform tersebut secara resmi kepada pemerintah Sumatra Selatan. SONGKET merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, Polda Sumatra Selatan, Forum DAS Sumatra Selatan WWFserta WRI Indonesia dalam upaya mendukung kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatra Selatan.

WRI Indonesia memberikan hibah berupa satu unit server yang didalamnya telah dibangun antara lain: Sistem Data dan Informasi Ekosistem Gambut yang terdiri dari (1) Basis Data Gambut, dan (2) WebGIS Pantau Ekosistem Gambut Sumatra Selatan. Kedua aplikasi sistem tersebut dikembangkan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatra Selatan. Disamping itu, juga diserahkan Sistem Data dan Informasi Kehutanan yang terdiri dari (1) Basis Data Kehutanan, (2) Sistem Informasi Pemantauan Kehutanan berkolaborasi dengan Dinas Kehutanan Sumatra Selatan. Diharapkan dengan bantuan (hibah) sistem tersebut dapat mendukung Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan dalam melakukan monitoring serta evaluasi dalam bidang tata guna lahan dan lingkungan hidup di Sumatra Selatan.

WRI Indonesia memfasilitasi dan mendampingi pemerintah provinsi Sumatra Selatan dalam kompetisi Bhumandala Awards-Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial. Terdapat dua platform yang dikembangkan oleh WRI Indonesia bersama pemerintah provinsi Sumatra Selatan yang ikut serta dalam kompetisi ini yaitu Sistem Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu (SONGKET) dan Sistem Data dan Informasi Ekosistem Gambut (SI-GAMBUT). Dalam kompetisi ini SONGKET berhasil terpilih sebagai “Inovasi Unggul/Perak”.

Pemetaan Partisipatif melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik

WRI Indonesia bersama dengan Tim KKN Tematik UNSRI (Universitas Sriwijaya) telah melakukan finalisasi Laporan Pemetaan Partisipatif Batas dan Potensi Desa di Kabupaten Musi Banyuasin dan diseminasi hasil kegiatan. Selain laporan, album peta batas desa/kelurahan dan potensi serta modul pemetaan partisipatif yang telah disusun oleh Tim KKN Tematik juga difinalisasi. Dokumen kegiatan dan album peta telah diserahkan kepada Pemda Musi Banyuasin.

Transformasi Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam

WRI Indonesia memberikan dukungan untuk pembuatan sistem informasi pemetaan konflik tenurial kawasan hutan di Sumatra Selatan. Setelah melalui berbagai tahapan teknis dan diskusi dengan parapihak termasuk ahli penanganan konflik, Sistem Informasi Pendataan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (SI PAKATAN) berhasil dibangun.

WRI Indonesia berkolaborasi dengan Dinas Kehutanan, Kelompok Kerja Perhutanan Sosial (Pokja PPS) dan Tim Kerja Pemetaan Konflik Tenurial Kawasan Hutan dan Hutan Adat (PKTKH-HA) di Sumatra Selatan telah melakukan pengenalan dan uji coba dalam upaya untuk mensosialisasikan sistem,

mengkonsultasikan kebutuhan dan keterbukaan data, serta menjangkau saran dan masukan terhadap penyempurnaan SI PAKATAN.

Monitoring dan Perlindungan Hutan

WRI Indonesia melaksanakan kegiatan *bootcamp* pembuatan dan penyempurnaan aplikasi otomatisasi tutupan lahan/ pemetaan digital berbasis web menggunakan platform Google Earth Engine. Penelitian dan pengembangan pemetaan komoditas perkebunan strategis di Sumatra Selatan berbasis data dan informasi penginderaan jauh diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pihak terkait khususnya di Sumatra Selatan dalam hal penggunaan dan pemanfaatan platform Google Earth Engine untuk pembuatan peta tutupan lahan. .

Bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Selatan dan UPTD KPH Wilayah I – XIV di Sumatra Selatan melakukan pemantauan hutan dan tutupan lahan. WRI Indonesia memberikan berbagai pelatihan mulai dari pengenalan aplikasi Global Forest Watch dan Forest Watcher, pelatihan metode pantau jejak. Pelatihan diikuti simulasi investigasi dengan survey lapangan menggunakan aplikasi Forest Watcher dengan memanfaatkan teknologi selular untuk pengambilan data lapangan dalam keperluan pemantauan hutan dan perubahan tutupan lahan di wilayah kerja KPH.

Pengakuan dan Pengelolaan Berkelanjutan Wilayah (Hutan) Adat dan Perhutanan Sosial

WRI Indonesia melakukan pendampingan pembaruan data kepada Tim Pengelola SI HUTSOS (sistem informasi perhutanan sosial) berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan. Pada bulan September 2021, telah dilaksanakan kegiatan pengenalan dan uji coba SI HUTSOS yang merupakan kerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Selatan dan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS). Pada implementasinya, SI

HUTSOS diharapkan dapat mendukung kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi Perhutanan Sosial di dalam sebuah sistem yang terintegrasi

WRI Indonesia berkolaborasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Selatan, Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Sumatra Selatan, dan KPH Wilayah X Dempo melakukan penguatan kapasitas kelembagaan Pengelola Hutan Adat dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di Kota Pagar Alam. Rangkaian penguatan kapasitas tersebut terdiri dari: Pelatihan pengelolaan hutan adat dan pengembangan usaha jasa lingkungan: lokalatih dan praktek lapangan pengelolaan pohon asuh di Tebat Benawa, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam; Pemantauan pembangunan kebun bibit di HA Tebat Benawa dan HKm Dempo Lestari: Observasi dan diskusi perkembangan pembangunan kebun bibit di HA Tebat Benawa, HKm – Dempo Lestari; Pelatihan pengembangan usaha pengolahan kopi: lokalatih dan diskusi pengembangan produk olahan kopi bubuk di Tebat Benawa, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam.

Bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Selatan, Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Sumatra Selatan, dan KPH Lakitan – Bukit Cogong, WRI Indonesia telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pemegang izin perhutanan sosial di KPH Lakitan – Bukit Cogong Kabupaten Musi Rawas. Rangkaian kegiatan tersebut terdiri dari: pelatihan penyusunan rencana kerja pengelolaan dan pengembangan usaha perhutanan sosial di KPH Lakitan – Bukit Cogong. Pendampingan proses penyusunan dokumen RPHD (Rencana Pengelolaan Hutan Desa) terhadap 4 LPHD di Lakitan – Bukit Cogong Kabupaten Musi Rawas; Pelatihan pengembangan usaha lebah madu tanpa sengat (trigona) di LBC Breeding Center, KPH Lakitan – Bukit Cogong.; Pembangunan kebun bibit dan diversifikasi tanaman pada areal KP; Penyediaan bibit untuk pembangunan kebun bibit oleh kelompok pemegang izin PS yang ada di Lakitan Bukit – Cogong, Kabupaten Musi Rawas.

Aceh dan Sumatra Barat

WRI Indonesia telah memulai program baru di Provinsi Aceh dan Sumatra Barat untuk mendukung pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan melalui skema perhutanan sosial. Program ini diimplementasikan bersama konsorsium yang terdiri dari KKI Warsi (Komunitas Konservasi Indonesia) dan KBCF (Kawal Borneo Community Foundation). KKI Warsi mengimplementasikan program di beberapa desa di Kabupaten 50 Kota di Sumatra Barat, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, dan Kalimantan Utara. Sementara itu KBCF mengimplementasikan program di wilayah Kalimantan Timur. Program dimulai pada Juni tahun 2021, WRI bersama konsorsium pada periode ini fokus mempersiapkan implementasi program dengan berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak, diantaranya pemerintah daerah, pemerintah desa, akademisi, CSO dan penggiat perhutanan sosial lainnya.

Papua dan Papua Barat

Mendorong Implementasi Satu Peta di Tingkat Tapak

Bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Informasi Infrastruktur Geospasial (PPIIG) Universitas Cendrawasih Papua, WRI Indonesia mengembangkan modul/kurikulum GIS untuk diterapkan kepada mahasiswa S1 sebagai mata kuliah pilihan. Modul ini juga digunakan sebagai pengantar bagi KKN mahasiswa.

WRI Indonesia mendukung PPIIG UNCEN untuk melakukan asistensi teknis implementasi bagi Simpul Jaringan di Provinsi Papua dan kabupaten Sarmi, Kerom, Jayapura serta Kota Jayapura, termasuk memfasilitasi proses pembinaan dari BAPPENAS dan BIG kepada Simpul Jaringan.

Analisis Perizinan Berbasis Lahan di Provinsi Papua

Untuk mendukung program Stranas PK di Provinsi Papua, WRI Indonesia memberikan asistensi teknis kepada Pemda Provinsi Papua dalam melakukan analisis legal dan analisis kebijakan untuk perizinan 55 perusahaan perkebunan sawit yang tersebar di 8 kabupaten (Jayapura, Kerom, Sarmi, Merauke, Boven Digoel, Mappi, Nabire dan Mimika). Hasil analisis ini telah merekomendasikan 33 perusahaan dicabut dan 22 perusahaan dikenakan sanksi administrasi. Proses ini masih berjalan dan dilanjutkan melalui evaluasi perizinan oleh KPK.

Pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat

Di Kabupaten Jayapura, WRI Indonesia mendukung Gugus Tugas Reforma Agraria untuk melakukan pemetaan sosial dan pemetaan spasial wilayah adat khususnya di 6 distrik. Kabupaten Jayapura sejak 2019 telah melakukan pemetaan wilayah adat skala luas dengan total indikatif 1,2 juta ha. Di Kabupaten Sarmi, WRI Indonesia mendukung pengusulan hutan adat di wilayah adat Isirawa.

Untuk Provinsi Papua Barat, WRI Indonesia mendukung Tim Kerja CSO yang melakukan standarisasi peta-peta partisipatif wilayah adat yang didukung oleh Badan Registrasi Wilayah Adat, FOKER LSM Papua, dan PPIIG UNIPA.

Pengelolaan Kebun Rakyat Berkelanjutan (komoditi kakao)

WRI Indonesia mendukung model pengembangan ekonomi – unit desa untuk komoditi kakao di Distrik Nenei, Kabupaten Manokwari Selatan. Kegiatan ini bekerja sama dengan Koperasi Eber Suth yang telah melakukan ekspor kakao. Bersama dengan LSM Mnuqwar memberikan berbagai pelatihan pengembangan produk dari kakao, terutama untuk kelompok perempuan.

Mendorong hutan perempuan Kota Jayapura

Kota Jayapura menjadi anggota Cities4Forests dengan kekhususan berbasis wilayah adat. WRI Indonesia mendukung proses pelibatan masyarakat adat dalam revisi tata ruang yang mengintegrasikan inisiatif Cities4Forests dimana inisiatif ini merupakan kerjasama WRI dengan Pemda Kota Jayapura dan Universitas Ottow Geissler. Sudah dilakukan pemetaan tempat penting di wilayah adat dan mendorong hutan perempuan menjadi wilayah yang dilindungi oleh Pemda Kota Jayapura. Hutan perempuan merupakan hutan di wilayah pesisir yang didominasi mangrove di mana pemanfaatan dan pelestariannya dilakukan oleh perempuan adat dari suku atau marga tertentu.

Riset dan Peningkatan Kapasitas

WRI Indonesia melakukan kegiatan penelitian melalui dua tematik studi yaitu 1) studi pendanaan pelestarian hutan bagi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua, bekerja sama dengan tim peneliti dari UNCEN (Universitas Cendrawasih); 2) studi awal tentang perempuan adat Papua dan pengelolaan sumber daya alam. Bekerja sama dengan UNCEN dan UNIPA (Universitas Papua), WRI Indonesia membuat *Call for Essay* dengan tema Penyelesaian Konflik Tenurial Berbasis Kearifan Lokal di Tanah Papua. Ada 25 esai terpilih untuk didokumentasikan.

Bersama UNIPA dan UI memberikan asisten teknis (*coaching clinic*) penulisan jurnal ilmiah dan ada 10 jurnal terpilih.

WRI Indonesia melaksanakan kegiatan Lingkar Belajar Tanah Papua secara *online* dengan tema yang relevan dengan strategi WRI di Tanah Papua dan bekerja sama dengan berbagai pihak.

Bersama UNIPA, UNCEN dan Ottow Geissler WRI Indonesia mengembangkan GIS Club Tanah Papua melalui pelatihan GIS dasar maupun lanjutan bagi kelompok muda dengan beragam latar belakang mahasiswa, aktivis, ASN (Aparatur Sipil Negara). Tercatat lebih dari 100 partisipan di GIS Club Tanah Papua.

REKAN DAN SAHABAT WRI INDONESIA



KOALISI DAN KOLABORASI

- **Accountability Framework Initiative (AFi)** - AFi merupakan wujud dari kolaborasi perusahaan dan organisasi masyarakat sipil untuk mempercepat peningkatan akuntabilitas dalam rantai pasok. AFi, yang diluncurkan pada pertengahan 2019, memberikan panduan yang jelas, konsisten, dan efektif, agar terjadi peningkatan akuntabilitas dalam implementasi komitmen rantai pasok yang lebih ramah lingkungan dan ramah sosial.
- **Aliansi Konservasi Indonesia (AKSI)** - Didirikan pada tahun 2015 dengan nama Forum Komunikasi Konservasi Indonesia (FKKI) dan kini berubah menjadi Aliansi Konservasi Indonesia (AKSI), AKSI merupakan wadah diskusi 9 organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang konservasi alam dan pembangunan berkelanjutan.
- **Clean Energy Investment Accelerator (CEIA) Indonesia** - CEIA Indonesia merupakan koalisi antara sektor publik dan swasta yang diinisiasi oleh Allotrope Partners, World Resources Institute, dan U.S. National Renewable Energy Laboratory (NREL) untuk mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan di sektor komersial dan industri di Indonesia.
- **Gotong Royong Atasi Susut & Limbah Pangan (GRASP) 2030** – GRASP 2030 adalah inisiatif berbasis sukarela yang mendorong tindakan bersama untuk mengurangi susut dan limbah pangan.
- **Koalisi Food and Land Use (FOLU) Indonesia** - Koalisi FOLU Indonesia adalah inisiatif global yang berupaya untuk memperbaiki sistem pangan dan tata guna lahan di dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang memimpin inisiatif ini, bersama dengan Kolombia, Etiopia, Cina, India, Australia, negara-negara Nordik, dan Inggris. Di Indonesia inisiatif FOLU berfokus pada pola makan sehat, pertanian yang produktif dan regeneratif, konservasi dan restorasi alam, serta laut yang lebih sehat dan produktif. WRI Indonesia adalah Sekretariat Koalisi FOLU di Indonesia.
- **Jejaring Mitra Lingkaran Temu Kabupaten Lestari (LTKL)** - LTKL adalah forum yang menjembatani dukungan bagi kabupaten dari jejaring mitra pembangunan nasional dan global, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan swasta dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Melalui LTKL, arah pembangunan kabupaten didukung agar dapat menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- **Konsorsium Hari Hutan Indonesia (HHI)** - Konsorsium HHI merupakan koalisi beranggotakan lebih dari 25 organisasi dan didukung lebih dari 70 kolaborator yang membantu menggaungkan perayaan Hari Hutan Indonesia setiap tanggal 7 Agustus. Tahun 2021, perayaan HHI diisi dengan pameran virtual, webinar, dan penandatanganan petisi.
- **Konsorsium RESTORE+** - RESTORE+ merupakan inisiatif yang diprakarsai oleh International Institute for Applied Systems (IIASA) dengan melibatkan World Agroforestry Center (ICRAF), WRI Indonesia, dan WWF Indonesia. RESTORE+ mengkaji pilihan

kebijakan restorasi bentang lahan yang dapat sekaligus menjawab kekhawatiran terkait isu lingkungan, pangan, ketahanan energi dan penggunaan lahan berkelanjutan. RESTORE+ di Indonesia telah mengembangkan aplikasi seluler Urundata sebagai platform pengumpulan data yang dibutuhkan dalam menyusun rencana restorasi.

- **Pantau Gambut** - Pantau Gambut adalah platform daring yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan gambut serta memantau perkembangan kegiatan dan komitmen restorasi ekosistem gambut yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta pelaku usaha di Indonesia. Dalam melaksanakan kegiatannya, Pantau Gambut didukung oleh berbagai organisasi tingkat nasional dan regional yang tergabung dalam Simpul Jaringan Pantau Gambut, yang tersebar di delapan provinsi di Indonesia.
- **Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (LCDI)** - Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (Low Carbon Development Indonesia/LCDI), dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), menganalisis berbagai opsi kebijakan pembangunan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Temuan analisis pembangunan rendah karbon telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2020-2024. Dengan demikian, arah pembangunan Indonesia pada 2020-2024 mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- **Pranata Informasi Restorasi Ekosistem Gambut (PRIMS)** - Tim PRIMS Gambut melaksanakan kegiatan Journalism Fellowship, berkolaborasi dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta. Kegiatan ini menyasar jurnalis di seluruh Indonesia, dan sepuluh jurnalis berhasil mendapatkan fellowship. Hasil dari kegiatan ini berupa 15 laporan mendalam tentang lahan gambut di enam provinsi, menggunakan data dari platform PRIMS Gambut. Laporan-laporan ini telah dimuat di berbagai media massa seperti Detik.com, the Jakarta Post, Mongabay Indonesia, Liputan6.com dan beberapa media lainnya.
- **Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan dan Mitigasi Kabut Asap di ASEAN (SUPA)** - Program SUPA, sebuah inisiatif yang didanai oleh Uni Eropa, bertujuan untuk mendukung strategi pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan di ASEAN melalui aksi kolektif dan kolaborasi aktor nonpemerintah. Sebagai langkah awal konsorsium yang terdiri dari WRI Indonesia, Tropical Rainforest Conservation & Research Center, dan Inisiatif Dagang Hijau berhasil melaksanakan rangkaian konferensi virtual bersama aktor nonpemerintah dari delapan negara Asia Tenggara.

LAPORAN KEUANGAN

Di tengah situasi pandemi yang masih mengancam, WRI Indonesia masih diberi kepercayaan dari mitra dan para pendukung. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2021, kami menerima dana dari pemerintah luar negeri dan lembaga filantropi independen. Seratus persen dana tersebut kami alokasikan untuk secara langsung mencapai misi WRI Indonesia. Untuk menjaga kredibilitas dan efektivitas kami, pendapatan dan pengeluaran kami ditinjau secara berkala oleh auditor profesional.

LAPORAN ASET BERSIH

SUMBER DANA	TAHUN 2021	TAHUN 2020	TAHUN 2019
Hibah/Kontribusi	106.309	12.548	198.030
TOTAL	106.309	12.548	198.030

PENGELUARAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	TAHUN 2019
Kegiatan Program	107.675	77.593	82.021
Administrasi	5.480	6.887	12.071
Pengembangan			
TOTAL Biaya	113.155	84.480	94.091

ASET BERSIH	TAHUN 2021	TAHUN 2020	TAHUN 2019
Aset bersih awal tahun	132.793	204.724	100.785
Perubahan pada Aset Operasional	-5.777	-26.621	3.758
Perubahan pada Aset Terikat	-1.069	-45.310	100.181
Total Perubahan pada Aset	-6.846	-71.931	103.939
ASET BERSIH AKHIR TAHUN	125.947	132.793	204.724

* Angka dalam Rp 000.000

RINCIAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN PER PROGRAM

PENDAPATAN	TAHUN 2021		TAHUN 2020		TAHUN 2019	
Lembaga Filantropi	16%	16.574	22%	2.773	2%	4.148
Pemerintah Luar Negeri	84%	89.765	78%	9.726	98%	193.845
Pendapatan lainnya	0%	-30	0%	49	0%	37
TOTAL Pendapatan	100%	106.309	100%	12.548	100%	198.030

PENGELUARAN	TAHUN 2021		TAHUN 2020		TAHUN 2019	
Pangan Hutan Air	78%	88.790	76%	64.327	73%	69.014
Iklim	10%	11.743	12%	10.103	9%	8.528
Energi	4%	4.870	2%	2.110	2%	2.345
Strategi / Administrasi	2%	1.827	1%	682	1%	958
Kota dan Transportasi	0%	444	0%	371	1%	1.176
Operasional	5%	5.480	8%	6.887	13%	12.071
TOTAL Pengeluaran	100%	113.155	100%	84.480	100%	94.091

* Tahun anggaran 2021 (1 Januari 2021 - 31 Desember 2021)
dibandingkan dengan tahun anggaran 2020, 2019

* Angka dalam Rp 000.000



SUMBER DAYA MANUSIA

WRI Indonesia menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga dalam organisasi. WRI memberikan kesempatan yang adil bagi semua jenis gender untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi keadilan lingkungan. Keseimbangan komposisi gender dalam organisasi selalu diupayakan, meskipun angkanya naik turun dari tahun ke tahun. Keadilan dan keadilan gender adalah salah satu nilai yang dianut organisasi.



BERGABUNG DENGAN KOMUNITAS WRI INDONESIA

Jelajahi tulisan dan penelitian WRI Indonesia di wri-indonesia.org.

Dapatkan informasi terkini melalui buletin bulanan WRI Indonesia. Daftar sekarang di bit.ly/NawalaWRI



Bergabunglah dalam percakapan dengan WRI Indonesia melalui:



facebook.com/WRIIndonesia



twitter.com/WRIIndonesia



flickr.com/photos/worldresourcesinstitute



instagram.com/WRIIndonesia



linkedin.com/company/wri-indonesia



pinterest.com/worldresources



WRI INDONESIA

Wisma PMI Lantai 3
Jalan Wijaya I no. 63
Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12170
+62 21 22775816
wri-indonesia.org